

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi advokasi yang dijalankan oleh The Pandemic Fund (PF) melalui jaringan advokasi transnasional dalam memengaruhi kebijakan pendanaan negara-negara donor utama khususnya Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PF bukan hanya lembaga pendanaan juga sebagai aktor advokasi transnasional yang mempraktikkan kekuasaan digital (*networked power*) untuk memobilisasi dukungan politik, membangun legitimasi reflektif, dan memperkuat arsitektur kesehatan global yang lebih inklusif serta berkeadilan.

Penelitian ini menggunakan kerangka Digital Transnational Advocacy Networks (DTANs) yang dikembangkan oleh Nina Hall untuk menganalisis empat strategi utama advokasi digital PF *proselytizing*, *conversing*, *testing*, dan *facilitating*. Peneliti menemukan bahwa strategi *proselytizing* dijalankan PF melalui kampanye digital seperti #InvestInPandemicFund dan #InvestInPreparedness yang menekankan narasi solidaritas global dan urgensi investasi jangka panjang dalam kesiapsiagaan pandemi. Melalui strategi *conversing* PF memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat sipil dan negara penerima bantuan melalui webinar, konsultasi publik, dan forum *town hall* yang melibatkan aktor dari berbagai kawasan. Walaupun strategi *testing* belum dioperasionalkan secara sistematis, PF mulai membangun praktik listening dan survei terbatas untuk memperbaiki mekanisme komunikasi dan transparansi. Strategi *facilitating* menjadi dimensi paling menonjol terlihat dari kolaborasi PF dengan jaringan advokasi

transnasional yang telah dibentuk yaitu Pandemic Action Network (PAN), WACI Health, Global Health Council, dan lembaga pelaksana seperti WHO serta UNICEF. Melalui jaringan ini, PF berperan sebagai fasilitator kolaborasi global yang memungkinkan advokasi dilakukan secara terdistribusi di berbagai tingkat.

Mengacu pada kerangka lima tahapan pengaruh Keck dan Sikkink, PF terbukti berhasil membentuk isu kesiapsiagaan sebagai agenda global, menggeser wacana donor dari bantuan menuju investasi, memperkuat prosedur tata kelola seperti *co-investment* dan *country-led approach* serta mendorong perubahan kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Pada periode 2023-2024, Amerika Serikat meningkatkan kontribusi hingga US\$667 juta, Jerman menambah €50 juta, dan Jepang memperluas dukungannya menjadi US\$135 juta. Dengan demikian, advokasi digital PF dan jaringan transnasional yang dibentuk telah berhasil mengubah narasi moral menjadi legitimasi fiskal yang meningkatkan komitmen dan kebijakan pendanaan donor terhadap PF.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama pengumpulan data. Dalam proses penulisannya, terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu disadari. Pertama, keterbatasan akses terhadap dokumentasi publik dan data resmi PF menjadi tantangan utama dalam penyusunan analisis. Sebagian besar arsip webinar, laporan internal, dan hasil konsultasi daring PF belum tersedia secara terbuka, sehingga analisis terhadap efektivitas strategi digital PF banyak bergantung pada publikasi eksternal, press release, dan unggahan media sosial resmi. Ketiadaan data kuantitatif seperti tingkat partisipasi peserta webinar, sebaran geografis audiens, serta engagement metrics dari kanal digital PF

membuat peneliti sulit mengukur secara empiris sejauh mana aktivitas advokasi digital PF berdampak terhadap kesadaran publik maupun pembentukan kebijakan donor. Dengan demikian, penelitian ini lebih berfokus pada analisis kualitatif atas representasi naratif dan framing yang digunakan PF dalam strategi advokasinya.

Kedua, keterbatasan transparansi PF dalam pelaksanaan survei dan mekanisme umpan balik publik juga menjadi hambatan bagi penilaian yang lebih mendalam terhadap dimensi digital conversing. Walaupun PF telah membuka sejumlah forum konsultatif dan survei daring, laporan lengkap mengenai jumlah responden, metode pengumpulan data, dan kategorisasi umpan balik tidak tersedia secara publik. Kondisi ini menyulitkan peneliti untuk menilai sejauh mana proses partisipatif tersebut bersifat inklusif dan representatif. Pola komunikasi dan advokasi PF berdasarkan data yang temuan masih lebih condong ke arah konsultasi elit dan expert-driven dialogue daripada percakapan publik yang benar-benar terbuka. Keterbatasan ini membuat analisis tentang efektivitas strategi conversing PF bersifat deskriptif, bukan verifikatif.

Ketiga, pada aspek facilitating, penelitian ini menghadapi keterbatasan dalam menilai dampak substantif kemitraan PF dengan organisasi masyarakat sipil seperti Pandemic Action Network (PAN), WACI Health, dan Global Health Council. Walaupun dokumen-dokumen publik PF dan catatan town hall menunjukkan adanya proses kolaboratif, bukti empiris mengenai sejauh mana rekomendasi masyarakat sipil diakomodasi dalam keputusan strategis PF masih terbatas. Tidak semua hasil konsultasi terdokumentasi atau dipublikasikan secara lengkap sementara sebagian besar data hanya dapat diakses melalui readout summaries tanpa transkrip penuh. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam mengukur

tingkat pengaruh aktor non-negara terhadap kebijakan internal PF. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa PF masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan tata kelola global yang benar-benar transparan dan deliberatif, serta menjadi batas metodologis bagi penelitian ini dalam melakukan evaluasi mendalam terhadap dinamika kekuasaan di dalam jaringan advokasi digital PF.

5.3. Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti menyarankan agar kajian selanjutnya meneliti keterkaitan antara aktivitas advokasi PF dan proses perumusan *Pandemic Accord* yang dipimpin oleh WHO serta peran Pandemic Action Network (PAN) sebagai penghubung antara masyarakat sipil global dan lembaga multilateral. Meskipun PF telah menunjukkan kemajuan dalam membangun legitimasi dan meningkatkan komitmen negara donor, keefektivitasan masih dihadapkan pada sejumlah hambatan struktural seperti keterbatasan transparansi, kesenjangan kapasitas antaraktor dan belum optimalnya partisipasi publik yang inklusif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya penting untuk mengeksplorasi bagaimana sinergi antara PF, WHO, dan jaringan advokasi transnasional dapat memperkuat koordinasi kebijakan serta mekanisme pembiayaan dalam sistem kesehatan global.